

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

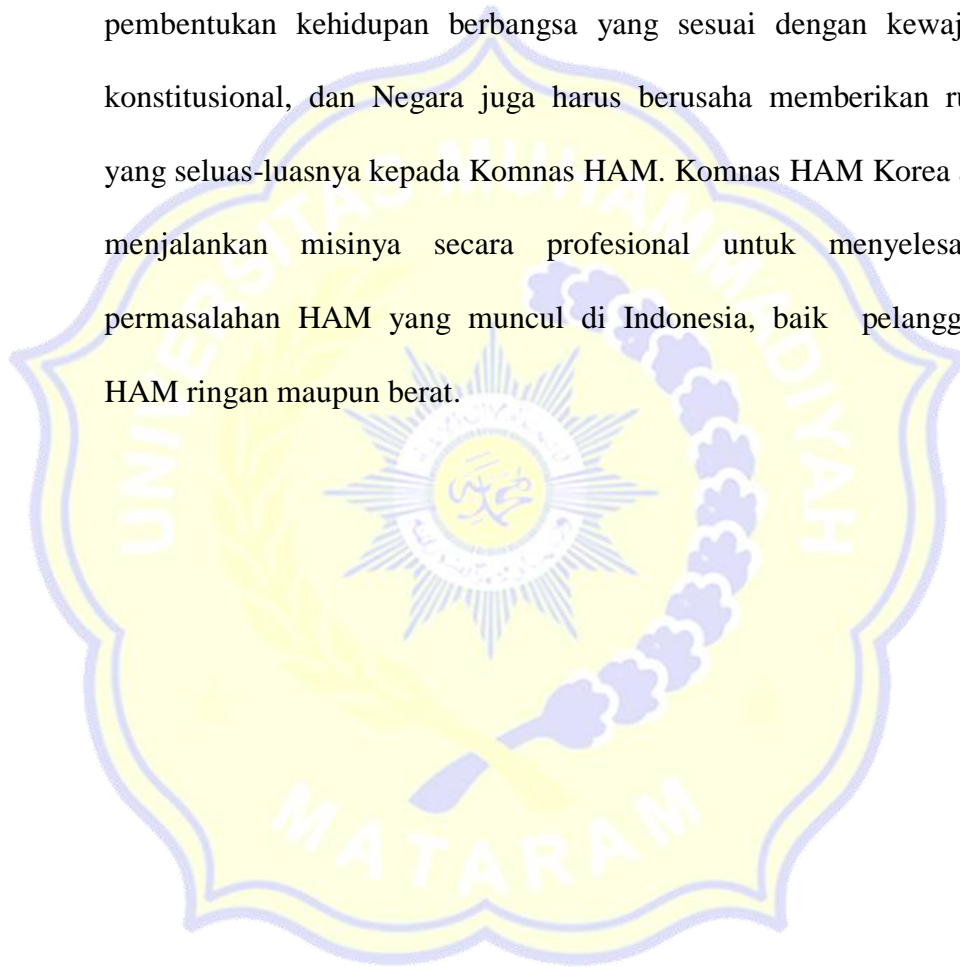
1. Pemenuhan Hak Konstitusional atas Kebebasan Berekspresi di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Berekspresi, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 2005 tentang Persetujuan ICCPR No.12
2. Hak atas kebebasan berekspresi di Indonesia belum dijamin secara hukum sesuai dengan Dokumen Hak Asasi Manusia UU No. 39 Tahun 1999. Hal ini sering dilihat oleh banyak aktivis mahasiswa dan masyarakat umum. Setelah menyatakan pendapat yang bertentangan dengan kepentingan penegak hukum dan aparat pemerintah, dibuka untuk umum dengan diteror, ditangkap dan ditahan sewenang-wenang oleh Polri.

B. Saran

Saran penulis berdasarkan hasil analisis di atas adalah sebagai berikut:

1. Ke depan, pemerintah perlu lebih memperhatikan baik peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan nilai hak asasi manusia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1954 dan segala peraturan perundang-undangan yang bersumber darinya. Dibentuk dan mencapai kesepakatan.
2. Ke depan, pemerintah melalui Polri dan TNI harus mengedepankan prinsip hukum dan hak asasi manusia, menyikapi isu kebebasan berpikir dan berekspresi secara terbuka, dan benar-benar mendukung

kebebasan berekspresi seluruh warga negara. Karena bagi negara yang sedang berkembang itu sendiri, kebebasan berpendapat yang sedang berkembang saat ini sangat diperlukan agar negara tersebut terus berkembang menjadi negara yang lebih maju dan demokratis. Perwujudan hak atas kebebasan berekspresi dapat memfasilitasi upaya pembentukan kehidupan berbangsa yang sesuai dengan kewajiban konstitusional, dan Negara juga harus berusaha memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada Komnas HAM. Komnas HAM Korea akan menjalankan misinya secara profesional untuk menyelesaikan permasalahan HAM yang muncul di Indonesia, baik pelanggaran HAM ringan maupun berat.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU / BUKU

- A Masyhur Effendi & Taufani Sukmawa Evandri, 2018, *HAM dalam dimensi/dinamika yuridis,sosial,politik*, Ghalia Indonesia.
- Andrey sujatmiko, 2019, *Hukum HAM dan hukum humaniter*,sinar grafika, Jakarta
- Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (jakarta : Rineka Cipta,
- Chrisbiantoro, 2017, *Kewajiban negara dalam penanganan kasus-kasus pelanggaran ham dan pelanggaran ham yang berat di Indonesia*, Setara Press.
- I gede Yusa, 2016, *Hukum Tata Negara*, Setara Press,
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tatanegara Dan Pilar-Pilar Demokrasi*, 2018, Sinar grafika, Jakarta
- Nalom Kurniawan Barlyan, 2019, *Dinamika HAM dan Tanggung jawab negara*, , Raja Grafindo Persada, jakarta
- Prof Philip Alston & Franz Magnis Suseno, *Hukum Hak Asasi Manusia*,academia tahun 2019
- Philip Alson & Prof. Franz Magnis-Suseno , *Hukum Hak Asasi Manusia*,
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji , “*penelitian hukum normatif suatu tinjauan singkat*”, jakarta : PT. Raja Grafindo Persada , 2015.
- Suparman Marzuki, 2011, *Tragedi politik hukum HAM*,Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Siti Hasanah, *sistem pemilu* , Genta Publishing, Yogyakarta.
- Titon Slamet kurnia, 2019, *penyelesaian pelanggaran HAM di Indonesia*, , PT Citra Aditya bakti, bandung
- Todung Mulya Lubis, *Mencari Hak Asasi Manusia*, Gramedia pustaka (2021)
- Wenly Ronald Jefferson Lolong, 2016, *Hukum Hak asasi manusia*, , Gramedia, Yogyakarta,

Widiada gunakaya, *Hukum hak asasi manusia*, 2017, Gramedia, yogyakarta
Yap Thiam hie, *Negara, HAM, dan Demokrasi*, 2019 ,(YLBHI , Diponegoro

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 16 Desember Tahun 1966, *konvenan internasional Hak sipil politik*

Indonesia, Tap MPR No. XVII Tahun 1998 *Tentang Hak Asasi Manusia*

Indonesia, Undang-Undang 39 Tahun 1999 *Tentang Hak Asasi Manusia, politik* LN.1999.No.165. TLN 3886

Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 *tentang Pengesahan konvenan internasional hak-hak sipil dan politik* LN.2005/No.119,TLN No.4558, LL SETNEG : 4 HLM

Indonesia, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 *Tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat* LN. 1998/ No. 181, TLN 3789

C. INTERNET/JURNAL

Amira Rahma Sabela dan Dina Wahyu Pritaningtias, "*kajian Freedom of speech and expression dalam Perlindungan Hukum Terhadap Demonstran di Indonesia*," *Lex Scientia Law Review* .

Akhmad Sukardja, *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar NRI 1945 Kajian Perbandingan tentang Dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat yang Majemuk*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)

Artikel skripsi dan dosen pembimbing "*tanggung jawab negaradalam perlindungan Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Internasional*," *Lex Privatum*,6.9 (2019), 33-39.Di akses pada tanggal 20 oktober 2021 paada puukul 19:00 WITA

Mara Ongku, "*Ham dan kebebasan berpendapat dalam Undang-Undang Dasar 1945*," *Al WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, 2.1 (2021).

Maghfur Ahmad, *Nahdlatul Ulama dan Pengegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, dalam *Jurnal "Religia"*, Vol,13 No, 02 Oktober 2010, hlm. 177

Tanang Haryanto dkk, *Pengaturan tentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum dan setelah Amandemen*, dalam jurnal “*Dinamika Hukum*”, Vol. 8 No, 2 Mei 2008, hlm. 141

<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/lsr/aericle/view/19484>.

<https://www.academia.edu/download/48466485/herlambang-ham-setelah-amademen-uud-1945a2.pdf> Di Akses Pada Tanggal 2 Februari 2022 Pukul 18:56 Wita

[https://www.komnasham.go.id/files/1604630519snp-kebebasan-berekspresidan--\\$SF7YZ0Z.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/1604630519snp-kebebasan-berekspresidan--$SF7YZ0Z.pdf) Di Akses Pada Tanggal 2 Februari 2022 Pada Pukul 19:45 Wita
General Comment No. 34 Para 2

https://pustaka.unpad.ac.id/wpcontent/uploads/2009/05/sistem_peraturan_perundang_undangan_negara_republik_Indonesia.pdf Di Akses Pada Tanggal 2 Februari 2022 Pukul 21 :03 WITA

<https://hukumonline.com/klinik/a/hierarki-peraturan-perundang-undangan-di-Indonesia-cl4012> Di Akses Pada Tanggal 2 Februari 2022 Pukul 22 :14 WITA

<https://hukumonline.com/klinik/a/hierarki-peraturan-perundang-undangan-di-Indonesia-cl4012> Di Akses Pada Tanggal 2 Februari 2022 Pukul 22 :14 WITA

https://pustaka.unpad.ac.id/wpcontent/uploads/2009/05/sistem_peraturan_perundang_undangan_negara_republik_Indonesia.pdf Di Akses Pada Tanggal 2 Februari 2022 Pukul 21 :07 WITA

<https://www.academia.edu/download/48466485/herlambang-ham-setelah-amademen-uud-1945a2.pdf> Di Akses Pada Tanggal 2 Februari 2022 Pukul 18:56 Wita

[https://www.komnasham.go.id/files/1604630519snp-kebebasan-berekspresidan--\\$SF7YZ0Z.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/1604630519snp-kebebasan-berekspresidan--$SF7YZ0Z.pdf) Di Akses Pada Tanggal 2 Februari 2022 Pada Pukul 19:45 Wita

<https://journal.unusia.ac.id/index.php/alwasath/article/download/135/117> Di Akses Pada Tanggal 2 Februari 2022 Pukul 22:05 WITA

<https://journal.unusia.ac.id/index.php/alwasath/article/download/135/117> Di Akses Pada Tanggal 2 Februari 2022 Pukul 22:05 WITA

<https://journal.unusia.ac.id/index.php/alwasath/article/download/135/117> Di Akses Pada Tanggal 2 Februari 2022 Pukul 22:05 WITA

<https://journal.unusia.ac.id/index.php/alwasath/article/download/135/117> Di
Akses Pada Tanggal 2 Februari 2022 Pukul 22:05 WITA

<https://journal.unusia.ac.id/index.php/alwasath/article/download/135/117> Di
Akses Pada Tanggal 2 Februari 2022 Pukul 22:015 WIT

